

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Peneliti Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, dan Variabel Penelitian	Metode Analisis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	<p>Pengaruh Konvergensi IFRS, Struktur Kepemilikan Saham, Tata Kelola Perusahaan, Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba</p> <p>Penulis : Agustina Santoso, 2016</p> <p>Variabel : Konvergensi IFRS (X1) Kepemilikan Manajerial (X2) Kepemilikan Institusional (X3) Independensi Dewan Komisaris (X4) Komite Audit (X5) Kualitas Audit (X6)</p>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>1. Konvergensi IFRS berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 2. Struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 3. Tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan dewan komisaris independen dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 4. Kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.</p>	<p>Persamaan Variabel yang digunakan dalam penelitian serta metode analisis yang diambil</p> <p>Perbedaan Sampel perusahaan dengan sub sektor berbeda yang digunakan dalam penelitian</p>

No	Judul, Nama Peneliti, dan Variabel Penelitian	Metode Analisis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Manajemen Laba (Y)			
2	<p>Pengaruh Pengadopsian International Financial Reporting Standards (IFRS) Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba</p> <p>Penulis : Sri Ayem, Suyanto, Umi Wahidah, 2019</p>	Analisis Regresi Linier Berganda	<p>1. Konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</p> <p>2. Hasil pengujian pengaruh Komite Audit (KA) terhadap manajemen menunjukkan bahwa Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p>3. Variabel komisaris independen, hasil penelitian ini juga</p>	<p>Persamaan</p> <p>Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian serta metode analisis yang diambil</p> <p>Perbedaan</p> <p>Sampel perusahaan dengan sub sektor berbeda yang</p>

No	Judul, Nama Peneliti, dan Variabel Penelitian	Metode Analisis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	<p>Variabel :</p> <p>Adopsi IFRS (X1) Komite Audit (X2) Kepemilikan Institusional (X3) Komisaris Independen (X4) Manajemen Laba (Y)</p>		<p>yang keberadaannya tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba perusahaan.</p>	<p>digunakan dalam penelitian</p>
3	<p>Pengaruh Adopsi IFRS, <i>Good Corporate Governance</i>, Asimetri Informasi, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba</p> <p>Penulis</p> <p>Ulva Rizky Mulyani, 2018</p> <p>Variabel</p> <p>Adopsi IFRS (X1) Dewan Komisaris Independen (X2) Komite Audit (X3) Dewan Direksi (X4) Asimetri Informasi (X4) Ukuran Perusahaan (X5)</p>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adopsi IFRS berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 2. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 3. Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 4. Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 5. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 6. Ukuran perusahaan 	<p>Persamaan</p> <p>Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian serta metode analisis yang diambil</p> <p>Perbedaan</p> <p>Sampel perusahaan dengan sub sektor berbeda yang digunakan dalam penelitian</p>

No	Judul, Nama Peneliti, dan Variabel Penelitian	Metode Analisis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Manajemen Laba (X6)		berpengaruh positif terhadap manajemen laba.	
4	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>, Kualitas Audit, Dan Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba</p> <p>Penulis Donny Prasetyo, 2017</p> <p>Variabel Kepemilikan Manajerial (X1) Kepemilikan Institusional (X2) Komite Audit (X3) Komisaris Independen (X4) Kualitas Audit (X5) Asimetri Informasi (X6) Manajemen Laba (Y)</p>	Analisis Regresi Linier Berganda	<p>1. Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menjelaskan bahwa mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>2. Penelitian ini membuktikan bahwa komisaris independen, kualitas audit, dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya komposisi dewan komisaris</p>	<p>Persamaan Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian serta metode analisis yang diambil</p> <p>Perbedaan Sampel perusahaan dengan sub sektor berbeda yang digunakan dalam penelitian</p>

No	Judul, Nama Peneliti, dan Variabel Penelitian	Metode Analisis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			tidak berdampak pada manajemen laba yang dilakukan perusahaan.	
5	<p>Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba</p> <p>Penulis : Novi Lidiawati, 2016</p> <p>Variabel Kualitas Audit (X1) Komite Audit (X2) Kepemilikan Institusional (X3) Ukuran Perusahaan (X4) <i>Lverage</i> (Y) Manajemen Laba (Y)</p>	Analisis Regresi Linier Berganda	<p>1. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba</p> <p>2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</p> <p>3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba</p> <p>4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba</p> <p>5. Leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba</p>	<p>Persamaan Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian serta metode analisis yang diambil</p> <p>Perbedaan Sampel perusahaan dengan sub sektor berbeda yang digunakan dalam penelitian</p>

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) merujuk pada relasi antara dua entitas, dimana yang pertama adalah pemilik (*principal*), dan yang kedua adalah manajemen (*agent*). Teori ini menggambarkan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal.

Teori agensi mengilustrasikan konflik kepentingan antara dua entitas ekonomi, yaitu prinsipal dan agen. Hubungan agensi adalah perjanjian dimana satu atau lebih individu (*prinsipal*) menginstruksikan individu lain (*agen*) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama prinsipal, sambil memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi prinsipal (Ichsan, 2013).

Teori agensi mengidentifikasi adanya konflik keagenan antara pemilik dan manajemen, yang dapat mendorong praktik manajemen laba. Dengan mendasarkan penelitian pada teori ini, dapat dijelaskan bagaimana kepentingan agen (*manajemen*) dapat bertentangan dengan kepentingan prinsipal (*pemilik*) terutama dalam konteks manajemen laba. Selain itu Dalam konteks manajemen laba, aspek pengawasan dan pengendalian sangat penting. Teori agensi menyoroti peran penting mekanisme pengawasan dan pengendalian, yang dapat berasal dari praktik GCG dan kualitas audit, dalam mengurangi risiko agensi dan memastikan bahwa keputusan manajerial sesuai dengan kepentingan pemilik.

2.2.2 Manajemen Laba

Menurut (Yahya & Wahyuningsih, 2019) manajemen laba merujuk pada tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memengaruhi laba yang tercatat dalam laporan keuangan dengan cara menggunakan praktek-praktek akuntansi tertentu, mempercepat pencatatan transaksi pengeluaran atau pendapatan, atau menerapkan strategi lain yang bertujuan untuk memengaruhi laba dalam periode waktu yang relatif pendek.

Manajemen laba merupakan intervensi dari pihak manajemen untuk mengatur laba yaitu dengan menaikkan atau menurunkan laba akuntansi dengan memanfaatkan atau kelonggaran penggunaan metode dan prosedur akuntansi. Karena standar akuntansi memperbolehkan perusahaan untuk memilih metode akuntansi. Praktik-praktik manajemen laba ini dapat mencakup penggeseran pendapatan, penundaan pengeluaran, atau manipulasi lainnya untuk menciptakan gambaran yang lebih menguntungkan dalam laporan keuangan. Praktik ini dapat melibatkan aspek hukum dan etika yang kompleks, dan dalam banyak kasus, manajemen laba yang berlebihan dapat merugikan pemegang saham dan pelaku pasar. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan ketat di berbagai yurisdiksi penting untuk mencegah penyalahgunaan manajemen laba.

Manajemen laba yang menerapkan *Discretionary Accrual Model*. Perusahaan dengan nilai akrual dekresi tinggi menunjukkan laba yang berkualitas rendah. Demikian pula dengan perusahaan dengan nilai akrual rendah menunjukkan laba perusahaan yang berkualitas tinggi. Dalam studi ini,

Indikator perhitungan Manajemen Laba menggunakan nilai dengan model jones dimodifikasi (*modified jones model*) yang dirumuskan oleh Jones sebagai berikut:

1. Menghitung nilai total akrual dengan menggunakan pendekatan arus kas (cash flow approach).

$$TAC_{it} = Ni_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun ke t .

Ni_{it} = Laba bersih setelah pajak perusahaan i pada tahun ke t .

CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan i pada tahun ke t .

2. Mencari nilai koefisien dari regresi total akrual :

$$TAC_{it}/TA_{it-1} = \beta_1 (1 / TA_{it-1}) + \beta_2 ((\Delta REV_{it} - TA_{it-1}) / TA_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it} / TA_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total akrual perusahaan pada tahun t

TA_{it-1} = Total aset perusahaan pada akhir tahun $t-1$

ΔREV_{it} = Perubahan total pendapatan pada tahun t

PPE_{it} = Property, Plant, and Equipment perusahaan pada tahun t

ϵ_{it} = Error item

3. Menghitung Nondiscretionary Accruals (NDAC)

$$NDAC_{it} = \beta_1 (1 / TA_{it-1}) + \beta_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / TA_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it} / TA_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

$NDAC_{it}$ = Nondiscretionary accruals perusahaan i pada tahun t

TA_{it-1} = Total aset perusahaan pada akhir tahun $t-1$

ΔREV_{it} = Perubahan total pendapatan pada tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan total piutang bersih pada tahun t

PPE_{it} = Property, Plant, and Equipment perusahaan pada tahun t

E_{it} = Error item

4. Menghitung discretionary accruals

$$DAC = (TAC/TA_{it-1}) - NDAC$$

Keterangan:

DAC = Discretionary Accruals

2.2.3 Konvergensi IFRS

IFRS adalah seperangkat standar akuntansi internasional yang disusun dan diterbitkan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB). Standar Akuntansi Internasional (IAS) disusun oleh empat entitas utama di tingkat internasional, yang meliputi Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSCO), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).

Konvergensi IFRS sendiri dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, mampu meningkatkan persyaratan elemen informasi sebagai usaha memperbaiki nilai perusahaan, meningkatkan tanggung jawab terhadap manajemen atas tata kelola perusahaan, dan untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang lebih akurat, relevan, serta dapat dibandingkan (Putri et al., 2020). Indonesia sendiri telah mengadopsi IFRS secara penuh pada tahun 2012 yang lalu. Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang

dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS.

IFRS sebagai standar internasional memiliki tren diri utama sebagai berikut :

1. *Principles-Based*. Standar yang menggunakan *Principles-Based* hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan standar yang *rule based*, memuat ketentuan pengakuan akuntansi secara detail. Keunggulan pendekatan ini akan menghindari dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan. Namun, standar yang bersifat *Principles - Based* mengharuskan pemakainya untuk membuat penilaian (*adjustment*) yang tepat atas suatu transaksi untuk menentukan substansi ekonominya dan menentukan standar yang tepat untuk transaksi tersebut.
2. Nilai Wajar. Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (*fair value*). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan utama (*historical value*). IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas untuk

beberapa item, seperti asset tetap dan asset tak berwujud, dibuka opsi penggunaan nilai wajar selain nilai perolehan. Nilai wajar lebih relevan namun harga perolehannya diyakini lebih reliabel.

3. Pengungkapan. Mengharuskan lebih banyak pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen.

Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan, menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS, dan memberikan manfaat untuk para pengguna yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy* dengan kategori 1 untuk perusahaan yang menerapkan IFRS, dan kategori 0 untuk perusahaan yang tidak menerapkan IFRS dengan cara melihat pada laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan perusahaan. Dikatakan perusahaan menerapkan IFRS apabila terdapat penyesuaian pada laporan

perubahan ekuitas karena adanya revisi atas PSAK yang sudah diterapkan, dan dikatakan perusahaan tidak menerapkan IFRS apabila tidak terdapat penyesuaian pada laporan perubahan ekuitas karena adanya revisi atas PSAK yang sudah diterapkan.

2.2.4 *Good Corporate Governance (GCG)*

2.2.4.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Menciptakan hubungan yang positif antara stakeholder ini merupakan persyaratan penting dalam mencapai kinerja perusahaan yang optimal, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan membawa nilai tambah secara berkelanjutan bagi pemegang saham dalam jangka panjang, sambil tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, sesuai dengan aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain, tata kelola perusahaan sangat erat kaitannya dengan nilai perusahaan dan, tentu saja, kinerja keuangan perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan rangkaian sistem yang mengatur dan mengawasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan nilai tambah bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan (Kusmayadi, Rudiana, & Badruzaman, 2015).

Menurut Adrian Sutedi (2011), tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja dan struktur yang diterapkan oleh organisasi perusahaan, yang mencakup pemegang saham atau pemilik modal, dewan komisaris atau pengawas, dan manajemen eksekutif, dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan tingkat pertanggungjawaban perusahaan dalam rangka mencapai nilai jangka panjang bagi pemegang saham, sambil tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat, dengan mengikuti aturan hukum dan prinsip-prinsip etika.

2.2.4.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh OECD, yang merupakan singkatan dari *Organisation for Economic Co-operation and Development*, secara rutin diperbaharui agar tetap sesuai dengan perkembangan industri. Prinsip-prinsip GCG ini merupakan pedoman atau kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan praktik tata kelola yang baik dalam operasional perusahaan. Tata kelola ini bertujuan untuk merumuskan tujuan bisnis, menjaga integritas, membangun kepercayaan di kalangan investor dan masyarakat, serta mendukung stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan.

1. Transparansi

Transparansi mengacu pada praktik yang melibatkan keterbukaan dalam mengambil keputusan serta memberikan informasi

yang penting dan relevan tentang perusahaan dengan akurasi dan ketepatan waktu.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas mencakup kejelasan mengenai tugas, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan dan karyawan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan efektif.

3. Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan dan kebijakan Perusahaan, dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika (kode etik).

4. Independensi

Independensi adalah situasi di mana perusahaan dikelola dengan profesionalisme tanpa adanya konflik kepentingan atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sejalan dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran dan Kestaraan

Kewajaran adalah prinsip kesetaraan dan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang muncul berdasarkan peraturan hukum, kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

2.2.4.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Penerapan tata kelola perusahaan dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan prinsip-prinsip GCG menjadi panduan dalam aktivitas sehari-hari. Perusahaan menjalankan mekanisme GCG dalam sebuah kerangka kerja di mana setiap organ GCG memiliki tanggung jawab khususnya, namun tetap menjalankan pelaksanaan GCG secara terkoordinasi.

Menurut (Mahrani & Soewarno, 2018), mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi mekanisme eksternal dan internal perusahaan diantaranya :

1. Mekanisme Eksternal

Mekanisme ini dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

a. Investor

Investor adalah seseorang atau entitas yang menyediakan modal atau dana untuk diinvestasikan dalam suatu proyek, bisnis, atau instrumen keuangan

dengan harapan mendapatkan keuntungan atau pengembalian investasi.

b. Auditor

Auditor adalah profesional independen yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memeriksa keuangan suatu perusahaan atau entitas. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Auditor juga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan.

c. Kreditor

Kreditor adalah pihak atau entitas yang memberikan kredit atau pinjaman kepada individu, perusahaan, atau entitas lain. Sebagai kreditor, mereka memiliki klaim atas pembayaran kembali pinjaman beserta bunga atau persyaratan lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

d. Lembaga Yang Mengesahkan Legalitas

Lembaga yang mengesahkan legalitas dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara tertentu. Umumnya, lembaga semacam itu bisa termasuk

pengadilan, lembaga pemerintah yang berwenang, atau badan regulasi khusus yang menangani aspek hukum. Misalnya, di banyak negara, kementerian hukum atau departemen pendaftaran perusahaan dapat menjadi lembaga yang mengesahkan legalitas pendirian dan keberlanjutan suatu entitas bisnis.

2. Mekanisme Internal

Mekanisme ini menurut Hatane et al (2019) dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi:

a. Kepemilikan Institusional

Lembaga institusional adalah entitas yang memiliki kepentingan signifikan dalam investasi, termasuk investasi dalam saham. Ini mencakup kepemilikan saham oleh lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, reksa dana, perusahaan sekuritas, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan entitas institusional lainnya.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang berasal dari pihak-pihak di luar perusahaan. Larasati (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham yang

dimiliki oleh institusi-institusi lain, seperti perusahaan, dana pensiun, reksadana, dan lain sebagainya, dalam jumlah yang signifikan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengawasi aktivitas manajemen dengan cara yang efektif, sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba (Irawan, 2013).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan yang dikuasai oleh lembaga atau institusi yang memiliki kemampuan yang signifikan dalam mengawasi, menjaga kedisiplinan, dan mempengaruhi tindakan manajer, dengan tujuan mendorong manajemen untuk menghindari tindakan egois. Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan (Siregar dan Utama 2005).

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

0% - 20%	2
21% - 40%	4
41% - 60%	6
61% - 80%	8

81% keatas	10
------------	----

Range :

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial mengacu pada saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Komalasari et al., 2013)

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh para eksekutif, manajemen, anggota dewan komisaris, atau individu lain yang secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Anggraeni, 2013).

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki kepemilikan dalam bentuk saham perusahaan, yang berarti bahwa manajer tersebut juga menjadi pemegang saham.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah istilah yang merujuk pada situasi di mana manajer atau eksekutif dalam sebuah perusahaan memiliki saham perusahaan tempat mereka bekerja. Ini berarti bahwa para manajer atau eksekutif memiliki kepentingan finansial dalam

kinerja perusahaan yang mereka pimpin, karena kinerja perusahaan akan berdampak langsung pada nilai saham mereka. Kepemilikan manajerial dapat mendorong para manajer untuk mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan dan pemegang saham, karena keberhasilan perusahaan akan menguntungkan mereka secara pribadi. Kepemilikan manajemen diukur melalui presentase kepemilikan saham Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Range :

0% - 20%	2
21% - 40%	4
41% - 60%	6
61% - 80%	8
81% keatas	10

c. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah bagian dari struktur pengawasan dan pengendalian dalam sebuah

perusahaan. Dewan Komisaris Independen terdiri dari individu atau anggota dewan yang tidak memiliki hubungan bisnis atau kepentingan finansial yang signifikan dengan perusahaan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka secara objektif, bebas dari konflik kepentingan, dan berfokus pada kepentingan pemegang saham perusahaan.

Tugas dewan komisaris melibatkan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada dewan direksi. Dalam upaya untuk memastikan penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* - GCG), pentingnya pembentukan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah entitas dalam perusahaan yang terdiri dari anggota dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan, dan fungsinya adalah mengevaluasi kinerja perusahaan secara menyeluruh dan komprehensif.

Peran utama komisaris independen adalah untuk menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rapat-rapat tertentu perusahaan, terutama dengan tujuan melindungi pemegang saham minoritas dan

pihak-pihak lain yang terkait. Komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Tugas utama komisaris independen adalah melindungi dan mengawasi pihak-pihak di luar manajemen, bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan antara manajer internal, memberikan nasihat kepada manajemen, dan mengawasi kebijakan manajemen. Untuk mengukur keberadaan komisaris independen, dapat digunakan rasio berdasarkan persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris perusahaan.

$$DKI = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan}}{\text{Seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

Range :

0 – 3	2
4 – 6	4
6 – 8	6
9 – 11	8
>11	10

d. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok individu yang ditunjuk oleh entitas yang lebih besar untuk melaksanakan tugas khusus atau menjalankan pekerjaan tertentu, atau dapat pula merupakan anggota dewan komisaris dari perusahaan klien yang bertanggung jawab membantu auditor dalam menjaga independensinya dari manajemen.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Komite Audit terdiri dari anggota yang memiliki independensi, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, dan hukum, dan mereka tidak memiliki konflik kepentingan yang signifikan dengan perusahaan. Fungsi utama komite ini adalah untuk memastikan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi keuangan diikuti, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat terhadap perusahaan. Dalam penelitian,

komite audit dievaluasi berdasarkan jumlah anggota dalam komite audit (Felicia Marsha dan Imam Ghozali, 2017)

$$KA = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

Range :

0 – 3	2
4 – 6	4
6 – 8	6
9 – 11	8
>11	10

2.2.5 Kualitas Audit

Kualitas audit mencakup semua kemungkinan di mana seorang auditor, ketika mengaudit laporan keuangan klien, dapat menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Dalam menjalankan tugasnya, auditor mengikuti standar audit dan kode etik akuntan publik yang berlaku secara relevan.

Kualitas Audit merupakan proses pemeriksaan yang sistematis dan independen yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah aktivitas yang telah direncanakan sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan dan apakah pengaturan tersebut dijalankan dengan efektif (Barung et al., 2018).

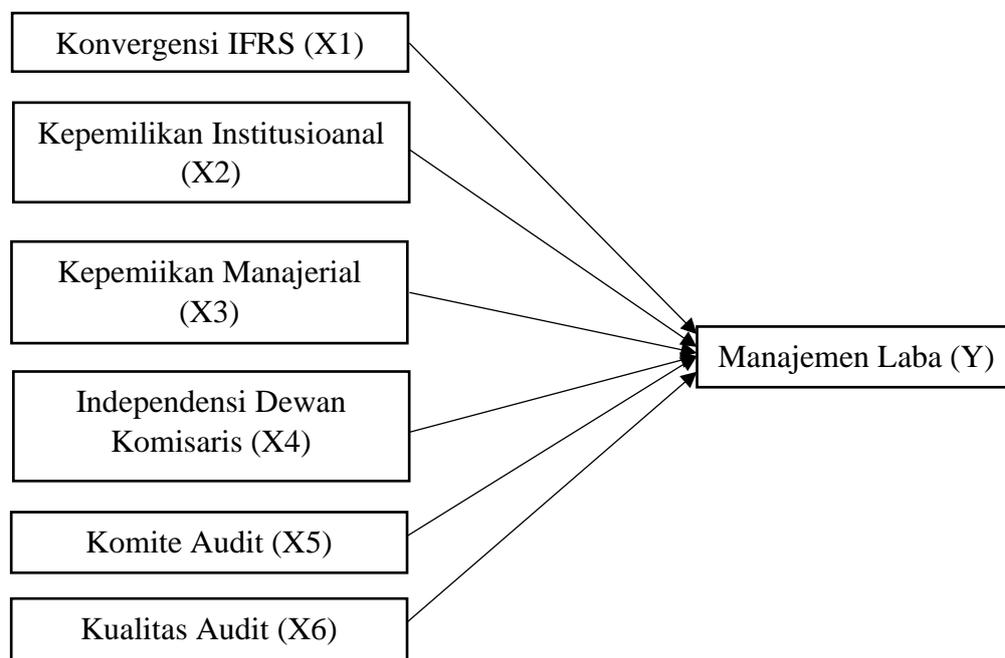
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2011, audit yang dilakukan oleh seorang auditor dapat dianggap memiliki kualitas jika mematuhi persyaratan atau standar yang umumnya berlaku dalam audit (*generally accepted auditing standards*) dan standar pengendalian mutu.

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur melalui proksi ukuran KAP tempat auditor bekerja, diukur dengan skala nominal melalui variabel dummy. Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan angka 0 digunakan untuk mewakili perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *non-Big Four*.

Range :

Ya	5
Tidak	0

2.3 Kerangka Konseptual



Manajemen laba dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, konvergensi IFRS diukur dengan variabel *dummy*, *Good Corporate Governance* dimana mekanisme *Good Corporate Givernance* ditandai dengan adanya kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi, kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan (direksi dan komisaris), indepedensi dewan komisari diukur dengan menggunakan skala rasio melalui presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan, komite audit diukur secara numeral dengan melihat jumlah nominal dari anggota komite audit yang ada pada *annual report* dan kualitas audit diukur melalui proksi ukuran KAP tempat auditor bekerja, diukur dengan skala nominal melalui variabel

dummy. Dengan perhitungan menggunakan alat ukur pada masing-masing variabel independen maka dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari konvergensi IFRS, *Good Corporate Governance*, dan kualitas audit terhadap manajemen laba.

2.4 Pengaruh / Hubungan Antar Variabel

2.4.1 Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah standar yang digunakan untuk salah satu solusi adanya ketidaksamaan antar standar akuntansi yang berlaku umum di masing-masing negara, dan diharapkan mampu menjadikan tolak ukur dalam meningkatkan kualitas akuntansi yang lebih tinggi (Irmawati & Diana, 2016). Proses konvergensi IFRS adalah penerapan standar global dalam laporan keuangan perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan, meskipun ada kemungkinan bahwa hal ini juga dapat memicu praktik manajemen laba. IFRS cenderung lebih menekankan penggunaan nilai wajar, terutama dalam kasus properti investasi, beberapa jenis aset tak berwujud, aset keuangan, dan aset biologis (Cahyati, 2010).

Karakteristik IFRS adalah bersifat berdasarkan prinsip (*principle-based*), yang artinya standar ini memiliki pedoman umum dan lebih singkat jika dibandingkan dengan pendekatan berdasarkan peraturan (*rule-based*). Dengan karakteristik dan filosofi IASB ini, banyak negara di seluruh dunia mulai mengadopsi IFRS. Indonesia juga mengadopsi IFRS karena ini membawa banyak manfaat, termasuk pengurangan biaya dalam penyusunan

standar akuntansi dan peningkatan kualitas standar akuntansi di Indonesia, sehingga laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat diterima dan digunakan di tingkat internasional.

Pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba dapat dijelaskan sebagai perubahan dalam standar akuntansi yang menghasilkan peningkatan transparansi, pengungkapan yang lebih lengkap, dan pengawasan yang lebih ketat, yang bersama-sama dapat mengurangi insentif dan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan.

Menurut (Agustina Santoso, 2016) Konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Menurut (Sri Ayem, dkk, 2019) Konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut (Ulva Rizky Mulyani, 2018) Adopsi IFRS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan argumen konseptual dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Dalam konteks Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*), kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga atau institusi keuangan, seperti dana pensiun,

perusahaan asuransi, dana investasi, bank, dan entitas serupa yang menjadi pemegang saham dalam perusahaan. Kepemilikan institusional adalah salah satu elemen yang penting dalam GCG karena dapat memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan perusahaan.

Larasati (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham investasi yang dimiliki oleh entitas seperti perusahaan, dana pensiun, reksadana, dan sebagainya dalam jumlah yang signifikan. Sementara Pasaribu & Sulasmiyati (2016) menggambarkan kepemilikan institusional sebagai persentase saham yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut.

Menurut (Agustina Santoso, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dalam mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Sedangkan menurut (Donny Prasetyo, 2017) kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Menurut (Sri Ayem, dkk, 2019) Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan argumen konseptual dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan institusioanl berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Salah satu komponen dalam *Good Corporate Governance* adalah kepemilikan manajerial, yang mengacu pada kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan yang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Pasaribu, Topowijaya, dan Sri, 2013)

Beberapa penelitian juga telah memberikan bukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Menurut (Agustina Santoso, 2016) kepemilikan manajerial dalam mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut (Donny Prasetyo, 2017) kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Menurut (Shierly Pricilia, dan Liana Susanto, 2017) terdapat pengaruh positif antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba. Berdasarkan argumen konseptual dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.4.4 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Independensi Dewan Komisaris adalah prinsip dalam tata kelola perusahaan yang menekankan bahwa anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan harus tetap bebas dari konflik kepentingan dan harus dapat menjalankan tanggung jawab mereka tanpa ketergantungan yang berlebihan

pada manajemen atau pihak-pihak lain yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Prinsip independensi ini dirancang untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris dapat bertindak sebagai pengawas yang efektif atas manajemen perusahaan tanpa ada pengaruh yang merugikan.

Peran komisaris independen adalah untuk mencapai keseimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rapat tertentu di perusahaan, terutama dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terlibat (Lukman and Geraldine, 2020). Menurut (Agustina Santoso, 2016) dewan komisaris independen dalam mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Menurut (Ulva Rizky Mulyani, 2018) Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan argumen konseptual dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.4.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Komite Audit adalah sebuah komite independen yang terbentuk dalam dewan direksi suatu perusahaan, khususnya perusahaan publik, dengan tujuan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap aspek keuangan dan pelaporan keuangan perusahaan. Fungsi utama komite audit adalah untuk

memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disiapkan dengan integritas, keakuratan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Komite audit adalah sebuah entitas yang bertanggung jawab membantu dewan komisaris dalam upaya meningkatkan mutu laporan keuangan serta efektivitas audit internal dan eksternal (Fabiyola, dkk, 2014). Menurut (Agustina Santoso, 2016) komite audit dalam mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Menurut (Sri Ayem, dkk, 2019) menyatakan hasil pengujian pengaruh Komite Audit (KA) terhadap manajemen menunjukkan bahwa Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan argumen konseptual dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.4.6 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba

Kualitas audit merujuk pada sejauh mana suatu audit dilaksanakan secara profesional, independen, dan teliti, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan merupakan representasi yang akurat dan dapat diandalkan atas kondisi keuangan dan transaksi perusahaan yang diaudit. Kualitas audit sangat penting dalam memastikan integritas, transparansi, dan kepercayaan dalam pelaporan keuangan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2011, suatu audit yang dilakukan oleh seorang auditor dapat dianggap berkualitas jika mematuhi ketentuan yang berlaku dalam standar audit yang diterima secara umum (*generally accepted auditing standards*) dan standar pengendalian mutu.. Menurut (Agustina Santoso, 2016) Kualitas audit yang d berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut (Donny Prasetyo, 2017) dalam penelitiannya, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Menurut (Novi Lidiawati, 2016) Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan argumen konseptual dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.5 Hipotesis Penelitian

H1 : Konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

H2 : Kepemilikan institusioanl berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba

H4 : Independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

H5 : Komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba

H6 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba